

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU USAHA PENGEDARAN
KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR**

BPOM

(Studi Kasus Putusan No. 157/Pid.sus/2020/PN Kds)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

Hukum Pidana



Disusun oleh :

BERLIANNISA JUNIAR

NIM. 201820026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU USAHA PENGEDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR BPOM

(Studi Kasus Putusan No. 157/Pid.sus/2020/PN Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Sarjana Stata Satu (S1) Hukum Dengan Kakhurusan
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

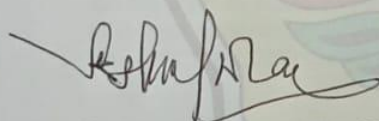
BERLIANNISA JUNIAR
NIM. 201820026

Kudus, 6 Februari 2023

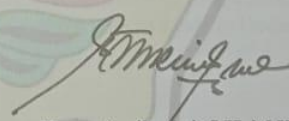
Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H

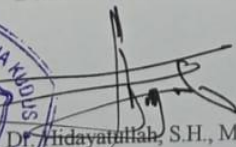


Henny Susilowati, S.H, M,H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berliannisa Juniar

NIM : 201820026

Alamat : Ds. Wates Rt 02/ Rw II Kec. Undaan. Kab. Kudus

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Bagi pelaku Usaha Pengedaran Kosmetik Ilegal yang Tidak Mencantumkan Nomor BPOM (Studi Kasus Putusan No. 157/Pid.sus/2020/PN Kds)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
3. Peenyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus

Kudus,

Yang membuat pernyataan

Berliannisa Juniar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Tidak peduli seberapa rumitnya kehidupan, tetaplah berfikir positif dan selalu percaya kepada Allah”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan serta petunjuk;
2. Kedua Orang tua yang selalu mendukung dalam bentuk apapun;
3. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Henny Susilowati, S.H, M,H selaku Dosen pembimbing II yang selalu membimbing jalannya skripsi dengan baik;
4. Teman-teman seperjuangan Penulis, Abel, Melly, Intan, Wulan;
5. Staff Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

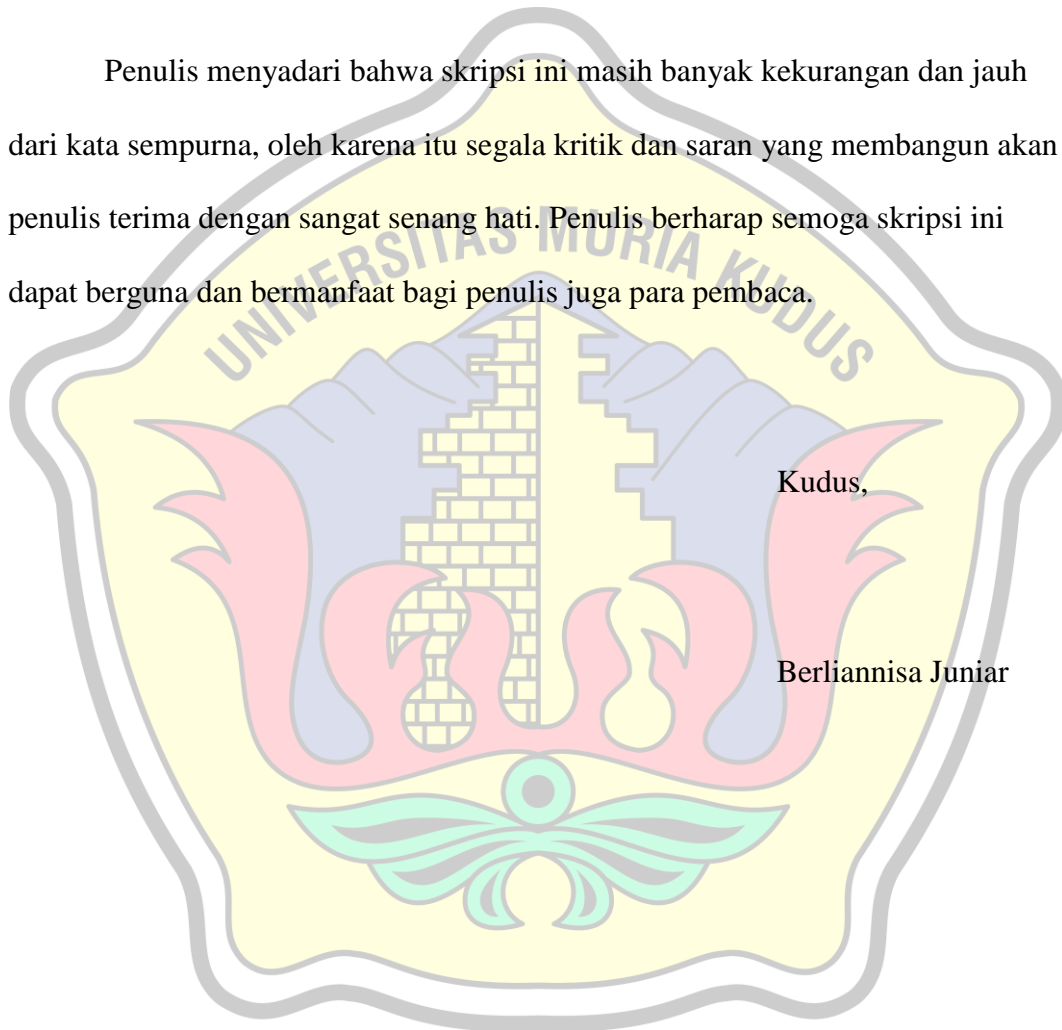
Segala puji dan syukur Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Bagi pelaku Usaha Kosmetik Ilegal yang Tidak Mencantumkan Nomor BPOM (Studi Kasus Putusan No. 157/Pid.sus/2020/PN Kds)”, sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Strata Sati (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan yang baik ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dwiyana Ahmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;

6. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dengan sabar;
7. Ibu Henny Susilowati, S.H, M,H selaku Dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dengan baik dan sabar;
8. Semua pihak yang telah membantu secara moril atau imateriil;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan sangat senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis juga para pembaca.



Kudus,

Berliannisa Juniar

ABSTRAK

Skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU USAHA PENGEDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR BPOM (Studi Kasus Putusan No. 157/Pid.sus/2020/PNKds)” bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara sanksi yang diberikan Hakim dengan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku pengedaran kosmetik ilegal serta mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kds.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data utamanya yaitu data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

Dari hasil penelitian menunjukkan pemberian jenis sanksi pidana kepada terpidana Putusan No.157/Pid.sus/2020/PNKds sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pidana penjara dan denda yang diberikan secara kumulatif. Namun ancaman pidananya belum sesuai dengan ancaman pidana Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda Rp.1.500.000.000,- karena hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp.5.000.000,-. Dalam putusan No.157/Pid.sus/2020/PNKds, Hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan pidana. Sanksi pidana yang terlalu ringan dalam kasus ini menyebabkan tidak dapat terpenuhinya tujuan ppidanaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pengedaran Kosmetik Ilegal, PN Kudus.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	14
B. Tinjauan Mengenai Pelaku Usaha.....	16
C. Tinjauan Mengenai Kosmetik Ilegal	18
D. Tinjauan Mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	22
E. Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim.....	23
F. Tujuan Pemidanaan	25
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	30
E. Metode Analisis Data	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A. Kesesuaian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Sanksi yang Diberikan Oleh Hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kds.	31
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelaku Penjualan Kosmetik Ilegal Tidak Ber-BPOM dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kds	44
BAB V.....	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
Buku:.....	63
Jurnal:.....	64
Skripsi dan Tesis:.....	66
Perundang-Undangan:	67

